

**STUDI KOMPARATIF FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP  
SISTEM PEMERINTAHAN KOTAMADYA DATI II  
MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1974  
DAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH KOTA  
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi  
syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi  
Sarjana Strata I Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

**NAMA : CRISTIAWAN HEPIDIANTO**

**NIM : 96.20.1366**

**NIRM : 96.6.111.01000.50048**

|                                                                                       |           |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | No. INV.  | 192 / H / 100                                                                                           |
|                                                                                       | Th. Angg. | -                                                                                                       |
|                                                                                       | PARAP.    |  TOL. 16 / 05 / 00 |

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2000**

**STUDI KOMPARATIF FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP  
SISTEM PEMERINTAHAN KOTAMADYA DATI II  
MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1974  
DAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH KOTA  
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi  
syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi  
Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**NAMA : CRISTIAWAN HEPIDIANTO**

**NIM : 96.20.1366**

**NIRM : 96.6.111.01000.50048**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2000**

Disetujui :

Dosen Pembimbing



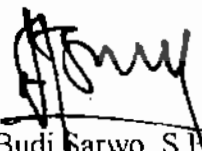
**Henricus Sanyotohadi, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum.



Ketua Dewan Penguji

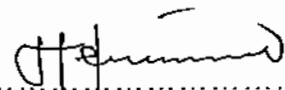
  
( Y. Budi Sarwo, S.H. M.H. )

Sekretaris Dewan Penguji

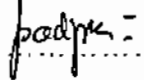
  
( Petrus Soerjowinoto, S.H. M.Hum. )

Dewan Penguji

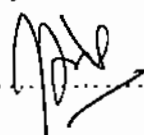
1. Henricus Sanyotohadi, S.H. M.H.

  
(.....)

2. V. Hadiyono, S.H. M.Hum.

  
(.....)

3. Sri Hartini .S., S. H. C.N.

  
(.....)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;  
carilah, maka kamu akan mendapat;  
ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

Karena setiap orang yang meminta, menerima  
dan setiap orang yang mencari, mendapat  
dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan."  
(Matius 7 : 7 – 8)

Jangan bertanya apa yang orang lain dapat berikan,  
tetapi bertanyalah apa yang dapat kau berikan kepada orang lain.

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

1. Ayah, ibu, dan kakak - kakakku tercinta.
2. Sahabat-sahabatku dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
3. Yang selalu memberi doa, semangat, dan dorongan padaku.
4. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“STUDI KOMPARATIF FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN KOTAMADYA DATI II MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1974 DAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

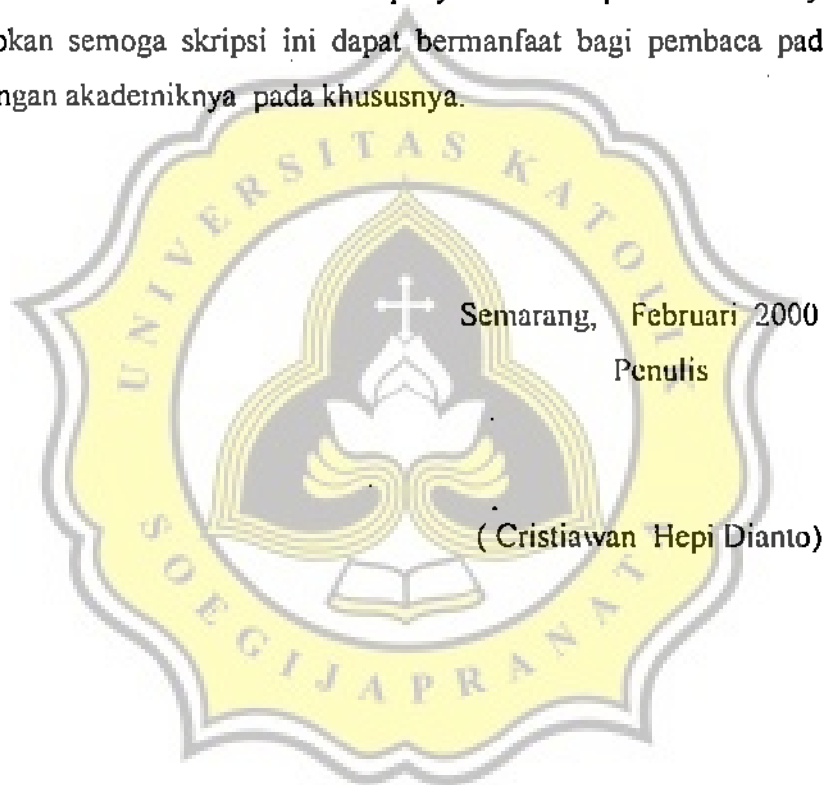
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang berat, sebab terbatasnya kemampuan dalam ilmu pengetahuan, maupun pengalaman yang penulis miliki, namun berkat motivasi yang tinggi, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, baik dalam bahasa maupun dalam penyusunannya, oleh karena itu penulis dengan tangan terbuka menerima saran dan kritikan dari pihak – pihak yang menaruh perhatian untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Romo Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengajukan skripsi guna menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I Ilmu Hukum.
3. Bapak Henricus Sanyotohadi, S.H., M.H., dan Bapak V. Hadiyono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini.
4. Bapak V. Hadiyono, S.H., M.Hum., selaku dosen wali.

5. Seluruh dosen dan Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Ayah, Ibu, dan kakak-kakakku yang selaku memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat serta teman-temanku angkatan '96 dan segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik dari semua pihak yang telah berperan serta di dalam membantu penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kalangan akademiknya pada khususnya.



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                        | Halaman   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                                    | i         |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                                                                              | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                                                               | iii       |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                                                                            | iv        |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                   | v         |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                       | vii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                                         | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                | 1         |
| B. Perumusan Masalah .....                                                                                             | 13        |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                             | 13        |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                                           | 14        |
| E. Sistematika Penulisan .....                                                                                         | 15        |
| <b>BAB II INTRODUKSI TEORI</b> .....                                                                                   | <b>18</b> |
| A. Sistem Demokrasi Dalam Pemerintahan Di Daerah .....                                                                 | 18        |
| B. Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang<br>Nomor 5 Tahun 1974 .....                                    | 24        |
| C. Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang<br>Nomor 22 Tahun 1999 .....                                   | 34        |
| D. Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Sistem Pemerintahan<br>Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 5<br>Tahun 1974 ..... | 43        |

|                                                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E. Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.....                                              | 55        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                                                                                                                         | <b>63</b> |
| A. Metode Pendekatan.....                                                                                                                                     | 65        |
| B. Spesifikasi Penelitian.....                                                                                                                                | 65        |
| C. Metode Penentuan Sampel.....                                                                                                                               | 66        |
| D. Metode Pengumpulan Data.....                                                                                                                               | 66        |
| E. Metode Analisa Data.....                                                                                                                                   | 67        |
| F. Metode Penyajian Data.....                                                                                                                                 | 67        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH..</b>                                                                                                       | <b>68</b> |
| A. Perbandingan Pengaturan Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No.22 Tahun 1999 Dalam Konsep Tata Pemerintahan Yang Demokratis..... | 68        |
| 1. Persamaan Pengaturan Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU No 5 Tahun 1974 dan UU No 22 Tahun 1999 .....                                                   | 68        |
| a. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....                                                                                                             | 68        |
| b. Sasaran Otonomi Daerah.....                                                                                                                                | 78        |
| c. Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah .....                                                                                                                   | 85        |
| 2. Perbedaan Pengaturan Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU No.5 Tahun 1974 dan UU No. 22 Tahun 1999 .....                                                  | 89        |
| a. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....                                                                                                             | 89        |
| b. Kewenangan – kewenangan Pemerintah Daerah .....                                                                                                            | 106       |
| c. Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah .....                                                                                                                   | 117       |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| B. Perbandingan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap         |     |
| Sistem Pemerintahan Daerah Menurut No. 5 Tahun 1974 dan |     |
| UU No. 22 Tahun 1999 Dalam Konsep Tata Pemerintahan     |     |
| Yang Demokratis .....                                   | 122 |
| 1. Persamaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap            |     |
| Sistem Pemerintahan Daerah Menurut UU No.5 Tahun        |     |
| 1974 Dan UU No. 22 Tahun 1999 .....                     | 122 |
| a. Hak dan Kewajiban DPRD .....                         | 122 |
| b. Rapat atau Sidang DPRD .....                         | 130 |
| 2. Perbedaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Sistem     |     |
| Pemerintahan Daerah Menurut UU No.5 Tahun 1974 dan      |     |
| UU No. 22 Tahun 1999 .....                              | 136 |
| a. Hak , Kewajiban, dan Wewenang DPRD .....             | 136 |
| b. Kedudukan DPRD dan Sistem Pengawasan Pemerintah      |     |
| Pusat .....                                             | 144 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                              | 156 |
| A. Kesimpulan .....                                     | 156 |
| B. Saran .....                                          | 165 |

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN